

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I. 1 Latar Belakang

Prasasti merupakan salah satu sumber tertulis tertua di Indonesia. Prasasti merupakan maklumat yang dipahatkan pada batu, logam<sup>1</sup>, daun *tal* (rontal atau lontar) dan kayu, dan bahan lainnya, dirumuskan menurut kaidah-kaidah tertentu dan berisikan suatu anugerah atau hak istimewa yang dikeluarkan oleh raja atau pejabat kerajaan sejak abad ke-5 M dan merupakan keputusan yang mengikat serta mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan dalam penetapannya diresmikan dengan suatu upacara (Bakker, 1972: 4--10, Boechari, 1977b: 2--4).

Prasasti yang menjadi obyek penelitian para ahli epigrafi berasal dari abad ke-4 M sampai abad ke-20 M, mencakup prasasti yang memakai aksara Pallawa dan berbahasa Sansekerta, aksara Prenagari dan berbahasa Sansekerta, aksara Pallawa dan berbahasa Melayu Kuno, aksara dan bahasa Sunda Kuno, aksara dan bahasa Jawa Kuno, aksara Jawa Kuno dan berbahasa Bali Kuno, aksara Latin dalam bahasa Belanda dan Portugis. Sebagian besar prasasti yang berasal dari zaman klasik (zaman Hindu-Buddha) diketahui membicarakan *sīma*<sup>2</sup>.

Prasasti-prasasti dari masa kolonial banyak dipahatkan pada nisan, biasanya berisi riwayat seorang tokoh yang dikuburkan meliputi nama, tanggal dan tempat kelahiran, tanggal dan tempat kematian, penyebab kematian, gambaran sifat semasa orang itu hidup serta jasa-jasanya semasa hidup. Terkadang dalam satu nisan dipahatkan beberapa nama orang berasal dari keluarga yang sama. Dalam kaitannya dengan hal ini, maka gambaran sifat serta jasa-jasa orang-orang yang dikuburkan tidak disebutkan. Ada juga prasasti

---

<sup>1</sup> Hasan Djafar, 2001. *Pengantar Epigrafi*. Depok: Jurusan Arkeologi FIB-UI. Hal: 45.

<sup>2</sup> *Sīma* berasal dari bahasa Sansekerta *siman* yang artinya tapal batas (sawah, tanah, desa, dan lain-lain) (Macdonell, 1954: 351). *Sīma* yakni suatu bidang tanah atau lahan, daerah atau wilayah menjadi kawasan otonom (perdikan), sebagai anugerah raja kepada seorang pejabat yang telah berjasa kepada kerajaan atau sebagai anugerah raja untuk kepentingan pengelolaan sesuatu bangunan suci yang biasanya berkenaan dengan pendharmaan (Boechari, 1977b: 5). *Sīma* menurut Ayatrohaedi (1978: 163) adalah tugu atau tiang batu yang dipasang sebagai tanda batas suatu daerah perdikan. Biasanya tugu ini berbentuk *lingga* yang dipasang di ke-empat sudut yang kadang kadang berisi prasasti untuk menyebut daerah perdikan yang dibatasi oleh tugu tersebut. *Sīma* adalah milik bebas, sebidang tanah (sawah, kebun, tegalan) bebas dari kewajiban lain-lain dan pajak (Zoemolder, 1995: 1092).

bertulisan aksara Arab seperti prasasti Fatimah binti Maimun di Leran, Jawa Timur, yang berangka tahun 1082/1102 M. Pada prasasti bertulisan aksara arab, ada yang hanya mencantumkan angka tahun saja misalnya nisan-nisan dari Tralaya<sup>3</sup>.

Prasasti Jawa Kuno dapat dibedakan menurut bahan yang digunakan yaitu prasasti batu (*upala prasasti*), prasasti tembaga<sup>4</sup> (*tamra prasasti*) dan prasasti lontar (*ripta prasasti*). Disamping itu ada pula berbagai prasasti yang ditulis pada lempengan atau lembaran emas, pada arca, genta dan benda-benda lain (Djafar, 2001: 69). Prasasti juga dapat dibedakan berdasarkan isinya. Sebagian besar prasasti berisi pengukuhan suatu wilayah (*sīma, swatantra, sarwa-dharmma*) (Kartakusuma, 2003: 205). Sebagian kecil merupakan *jayapāttra* yaitu prasasti yang memuat keputusan hukum atau keputusan pengadilan mengenai masalah kewarganegaraan dan hutang piutang. Contoh prasasti jenis ini adalah prasasti Guntur 829 Ś dan prasasti Wurudu Kidul 844 Ś. *Jayapāttra* memberikan keterangan tentang proses pengadilan di dalam masyarakat jawa kuno (Boechari, 1977b: 21). Prasasti yang memuat keputusan hukum yang berhubungan dengan sengketa tanah disebut *jayasong*, contohnya prasasti Bendosari yang berasal dari masa pemerintahan raja Hayam Wuruk dan prasasti Parung yang mungkin sejaman dengan prasasti Bendosari. *Rājaprasāsti* merupakan prasasti yang berisi keputusan raja mengenai masalah tanah, misalnya prasasti Himad dari jaman Majapahit dan prasasti Sarwwadharmma 1191 Ś (Boechari, 1975: 81). *Suddhapāttra* merupakan prasasti yang berisi tentang

---

<sup>3</sup> L. C Damais. (1995). *Pilihan Karangan L. C. Damais*. Hal: 223-332. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional

<sup>4</sup> Tembaga adalah jenis logam yang mula-mula dimanfaatkan manusia sebelum mereka mengenal jenis logam lain. Kemudian dikenal pula emas. Kedua jenis logam ini sering dimanfaatkan manusia karena keduanya memiliki titik lebur yang tidak terlalu tinggi (Jatmiko, 1993: 66-68). Tembaga merupakan salah satu unsur kimia yang disebut *cuprum* (Cu). Tembaga bernomor atom 29, memiliki bobot atom 63, 54 dan berisotop alam 63 dan 65. Titik leleh tembaga adalah 1.803° C, sedangkan titik didihnya adalah 2.336° C. Tembaga bersifat lunak, berwarna merah kekuningan, tahan karat, sangat mudah ditempa dan diulur, serta dapat menjadi penghantar listrik yang baik. Dalam keadaan udara kering tembaga takkan mudah berubah, namun ketika dalam keadaan udara lembab yang banyak mengandung karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) maka akan terbentuk lapisan kehijauan Cu<sub>2</sub>(OH)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>. Tembaga larut dalam asam nitrat, tapi tidak mudah larut dalam asam klorida (HCl) dan asam sulfat dingin. Biasanya tembaga dipergunakan sebagai katalis untuk pembuatan perunggu, kuningan dan mata uang (Hassan Shadily, 1984: 3491-2; Nawawi, 1993:21). Menurut Kosasih (1993: 164-165) para pengrajin tembaga telah menempa tembaga murni dalam bentuk lembaran tipis. Lembaran itu kemudian dipotong dengan semacam pahat sebelum dimanfaatkan menjadi barang.

pelunasan hutang atau proses gadai, misalnya prasasti Bulai C dan prasasti Kurungan (Boechari, 1975: 81; Susanti, 1997: 175). *Jayacihna* merupakan prasasti yang berisi pernyataan kemenangan.

Ada juga prasasti berisi maklumat yang dikeluarkan oleh raja atau pejabat tinggi kerajaan. Contoh prasasti jenis ini salah satunya berasal dari Bali. Jenis prasasti maklumat biasanya diawali dengan kata-kata seruan seperti *yumu pakatahu* dan *iku wruhane*<sup>5</sup>. Prasasti yang dimulai dengan *yumu pakatahu* disebut prasasti *yumu pakatahu* yang artinya ketahuilah oleh kamu sekalian. Contohnya adalah prasasti Julah dari raja Ūgraśenā 873 Ś dan prasasti Katiden.

Ada dua belas prasasti yang memuat keputusan hukum. Dari dua belas prasasti itu dapat diketahui bahwa masyarakat Indonesia telah memiliki sistem hukum yang baik. Adanya para pejabat yang mengurus masalah hukum diketahui sejak masa Majapahit<sup>6</sup> yakni *dharmmādhyakṣa* (pejabat keagamaan) dan *dharmmopapatti* (pejabat kehakiman); serta adanya naskah-naskah hukum seperti kitab *Sarasamuccaya* dan naskah agama<sup>7</sup> maka dapat diketahui bahwa kehidupan masyarakat Jawa kuno pada khususnya telah diatur dengan baik (Boechari 1975: 79; 1977b: 21).

Secara singkat Hasan Djafar dalam karangannya yang berjudul “Prasasti dan Historiografi” (1991) menyebutkan mengenai bagian-bagian dalam sebuah prasasti *sīma* yang terdiri dari:

1. *manggala* atau seruan pembukaan yang berupa seruan selamat atau seruan hormat untuk dewa

<sup>5</sup> Prasasti yang diawali oleh kata *iku wruhane* berasal dari masa Majapahit.

<sup>6</sup> Patut untuk diketahui bahwa pejabat hukum sudah ada sebelum masa Majapahit. Hanya saja penyebutannya berbeda dan jumlahnya mungkin tidak sebanyak pada zaman Majapahit. Hal ini dapat dilihat pada Prasasti Wurudu Kidul A dan Prasasti Wurudu Kidul B (922 M) yang memuat mengenai keputusan hukum menyangkut Sang Dhanadi yang dituduh sebagai orang asing, dan melalui kesaksian keluarganya serta orang-orang disekelilingnya, ia dianggap sebagai penduduk asli dan ia memenangkan pengadilan dan diberi *jayapattra* oleh Pamgat i Paḍang dan Samgēt i Lucēm. Satu bulan kemudian, Sang Pāmāriwa menarik pajak orang asing (*kikéran*) yang ditujukan kepada Sang Dhanadi yang dianggapnya orang Khmer (*wka kmir*) dan mengadukannya kembali ke pengadilan. Kemudian ia menerima surat (*jayapattra*) dari Samgat Juru i Maḍanḍér yang menyatakan bahwa Sang Dhanadi bukanlah orang Khmer.

<sup>7</sup> Kitab ini telah di bahas dalam disertasi J.C.G. Jonker (*Een Oud-Javaansch Wetboek Vergeleken met Indische Rechtsbronnen*. Leiden. 1885). Kedua kitab hukum itu telah diterbitkan dan berisi futsal-futsal hukum yang terbagi atas 18 pelanggaran (*aṣṭadasawyahāra*) (Boechari, 1975: 79—80).

2. unsur-unsur penanggalan, yang menyebutkan hari, tanggal, bulan dan tahun, dan kadang-kadang dilengkapi pula dengan unsur-unsur astronomiknya<sup>8</sup>
3. nama raja atau pejabat pemberi perintah
4. nama pejabat tinggi yang mengiringi, meneruskan dan menerima perintah
5. peristiwa pokok, yaitu penetapan suatu desa atau daerah menjadi *sīma*
6. *sambhanda*, berisi alasan atau sebab-sebab mengapa suatu desa atau daerah itu dijadikan *sīma*
7. jalannya upacara penetapan *sīma*
8. daftar para saksi atau pejabat yang hadir pada upacara penetapan *sīma*
9. sumpah atau kutuk bagi siapa yang melanggar atau tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan
10. penutup.

Prasasti sebagai sumber sejarah banyak memberikan sumbangan keterangan. Berbagai keterangan penting yang diperoleh dari suatu prasasti yaitu mengenai struktur kerajaan, struktur birokrasi, struktur kemasyarakatan, struktur perekonomian termasuk kegiatan pertanian dan perdagangan, agama, sistem kepercayaan dan adat istiadat di dalam masyarakat Indonesia kuno, aksara, bahasa, hukum, keadaan topografi, serta pemukiman (Boechari, 1977b: 22; Haryono, 1980: 37; Kartakusuma, 2003: 202). Adakalanya disebutkan uraian mengenai genealogi atau asal usul seorang tokoh pada bagian *sambandha*-nya seperti dalam prasasti Pucangan, prasasti Kebantenan<sup>9</sup> dan prasasti Batu Tulis (Djafar, 1991: 179).

---

<sup>8</sup> Pada awal perkembangannya, unsur penanggalan hanya terdiri atas 5 unsur saja, namun semakin lama semakin banyak dan mencapai puncaknya pada zaman Majapahit.

<sup>9</sup> Prasasti Kebantenan dituliskan pada lima lempeng tembaga, tanpa angka tahun tapi secara paleografis berasal dari Śri Baduga Mahārāja, raja yang berkuasa di Pakuan Pajajaran abad ke-15 M. Dalam prasasti ini pada bagian awalnya dituliskan asal usul Śri Baduga.

Di Indonesia ada 3000 *abklatsch*<sup>10</sup> prasasti baik logam maupun batu yang telah dibuat dan tersimpan di Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional (Boechari, 1977b: 3). Dari daftar prasasti yang dikumpulkan Damais dalam *Études d'Épigraphie Indonésienne III*, ada 292 prasasti yang berangka tahun dari Pulau Jawa, Pulau Madura, Pulau Bali dan Pulau Sumatera (Boechari, 1977b: 3).

Prasasti dianggap sebagai data yang paling dapat dipercaya karena ditulis pada masanya sehingga prasasti-prasasti itu harus diteliti, dialihaksarakan dan diterjemahkan. Penelitian prasasti dilakukan untuk mengungkapkan keterangan yang ada didalamnya kepada masyarakat sehingga apa yang tertulis dalam prasasti dapat menjadi bahan pembelajaran bagi masyarakat. Penelitian yang lebih mendalam terhadap prasasti masih harus dilakukan karena meskipun sebagian prasasti-prasasti itu telah dibaca dan diterbitkan, kebanyakan masih dalam bentuk transkripsi sementara. Tugas seorang ahli epigrafi sekarang ini tidak saja meneliti prasasti-prasasti yang belum diterbitkan tetapi juga meneliti kembali prasasti yang sudah terbit dalam bentuk transkripsi sementara, kemudian harus diterjemahkan ke dalam bahasa modern sehingga para ahli yang lain, terutama ahli sejarah dapat menggunakan keterangan yang terkandung di dalamnya (Boechari, 1977b: 3).

Suatu prasasti dituliskan dengan aksara dan bahasa *archais*<sup>11</sup> yang sudah tidak dikenal masyarakat umum, maka perlu dilakukan alih aksara dan

---

<sup>10</sup> *Abklatch / abklatsch* merupakan cetakan dari suatu prasasti (umumnya prasasti batu). Bahan yang dipakai untuk membuat *abklatsch* adalah kertas singkong. Pembuatan *abklatsch* diawali dengan pembersihan batu prasasti dengan air serta sikat berbulu halus agar tidak merusak permukaan prasasti. Ketika batu prasasti masih basah kertas singkong ditempelkan dan dipukul dengan pelan menggunakan sikat hingga kertas singkong masuk ke semua celah yang ada di permukaan prasasti terutama pada bagian yang bertulisan. Setelah itu kertas singkong dibiarkan mengering. Banyak sedikitnya kertas singkong yang digunakan untuk membuat *abklatsch* tergantung pada kedalaman pahatan aksara yang dipahatkan pada prasasti.

<sup>11</sup> Menurut Sinclair (1990: 63), bahasa yang *archais* (kuno) dahulunya merupakan bahasa standar yang sering dipakai namun pada masa selanjutnya, bahasa ini hanya ditemukan pada karya-karya sastra kuno. Sedangkan menurut Brown (1993: 108), *archaic* mengacu kepada kata dan bahasa yang sudah jarang dipakai oleh seseorang atau hanya dipakai untuk keperluan tertentu misalnya karya sastra. Bahasa kuno bukannya punah sama sekali karena masih ada kelompok-kelompok masyarakat yang masih menggunakan beberapa kata bahasa kuno ini dalam keseharian mereka meskipun tidak banyak. Contohnya adalah kata *buyut* (ayah/ibu dari kakek/nenek), *rama* (jawa modern: romo, ayah).

terjemahan bahasanya untuk membantu memahami apa yang disebutkan di dalam prasasti. Prasasti atau sumber-sumber tertulis yang berasal dari masa lampau sebagian besar dikategorikan sebagai dokumen resmi pemerintah pada masanya, yang isinya mengenai keterangan aspek-aspek kehidupan masyarakat masa lampau. Oleh karena itu, keterangan tadi perlu diketahui untuk melengkapi penulisan sejarah nasional Indonesia agar dapat direkonstruksi guna melengkapi penulisan sejarah nasional Indonesia.

Salah satu sumber tertulis dari masa lampau yang penting untuk menyumbangkan data sejarah adalah prasasti Muṇḍu<sup>o</sup>an. Mohammad Umar, pengajar jurusan sejarah pada IKIP Semarang membahas prasasti ini dalam bentuk makalah pada *Seminar Sejarah Nasional II* yang diselenggarakan pada tanggal 26 hingga 29 Agustus 1970 di Yogyakarta.

Ada perbedaan dalam membaca angka tahun prasasti Muṇḍu<sup>o</sup>an. Mohammad Umar membaca 748 Ś, sedangkan Boechari (1993: 115), Nakada (1982: 74-75), dan Darmosoetopo (2003: 28) membaca 728 Ś. Jika angka tahun pada prasasti ini memang benar 748 Ś (826 M), dapat dipastikan prasasti ini dikeluarkan 2 tahun setelah prasasti Kayumwungan (824 M) dan 8 tahun sebelum prasasti Gondosuli II (Sanj Hyanj Wintanj 832 M), maka dapat diperkirakan bahwa tokoh penguasa yang disebut dalam prasasti Muṇḍu<sup>o</sup>an sama dengan tokoh yang ada di dalam prasasti Kayumwungan dan prasasti Gondosuli II. Namun jika pembacaan angka tahun ini ternyata menunjukkan angka tahun 807 M, maka akan menjadi sumber baru untuk masa awal kerajaan Mataram Kuno.

Pembahasan yang dilakukan Mohammad Umar mencakup penemuan prasasti Muṇḍu<sup>o</sup>an dan isinya. Ia menyatakan bahwa angka tahun prasasti Muṇḍu<sup>o</sup>an harus diteliti lagi, terutama bagian puluhannya. Hal ini berkaitan erat dengan identifikasi J. G de Casparis mengenai tokoh Rakai Patapān Pu Palar yang identik dengan Rakai Patapān Pu Manuku dan Rakai Garung. Namun jika pembacaan angka puluhan yang masih diragukan oleh Mohammad Umar itu salah atau ditemukan prasasti lain yang menyebut Rakai Patapān Pu Manuku tetapi diluar tahun 819 – 840, maka identifikasi de Casparis ini salah.

Prasasti Muṇḍu<sup>o</sup>an ditulis dengan aksara Jawa Kuno dan bahasanya Jawa Kuno dipahatkan pada dua lempeng tembaga berukuran 9,5 cm x 32,2 cm dengan

tebal rata-rata 1 mm. Setiap lempeng terdiri atas tujuh baris. Aksaranya di pahatkan simetris, agak miring ke arah kanan dan berbentuk tambun. Aksara yang dipahatkan pada lempeng pertama maupun lempeng kedua memiliki ukuran sama, yaitu tinggi 0,5 cm dengan lebar berkisar antara 0,4 hingga 0,6 cm. Pahatan aksara lempeng pertama tidak sedalam pahatan aksara lempeng kedua. Menurut hasil pembacaan Boechari (1993: 115), prasasti Muṇḍu<sup>o</sup>an berisi mengenai penetapan desa Muṇḍu<sup>o</sup>an sebagai *sīma* oleh Rakai Patapān Pu Manuku pada tahun 728 Ś (21 Januari 807 M). Penguasa wilayah ini membatasi tanah di Muṇḍu<sup>o</sup>an dan Haji Huma, untuk dianugerahkan kepada Sang Patoran yang diberi tugas untuk menggembalakan kambing. Tanah di Muṇḍu<sup>o</sup>an dan Haji Huma dibebaskan<sup>12</sup> dari pajak jual beli dan denda pelanggaran hukum yang biasanya dibayarkan kepada Rakai Patapān.

Meskipun pernah membuat alih aksara dan terjemahan atas prasasti Muṇḍu<sup>o</sup>an, namun Umar tidak melakukan pembahasan yang mendalam terhadap isi prasasti Muṇḍu<sup>o</sup>an dan tidak memberikan tafsiran lebih lanjut tentang isi prasasti ini, padahal data sejarah yang termuat dalam prasasti ini penting untuk dibahas. Salah satu hal yang harus disadari adalah penulis prasasti (*citralekha*) tidak bermaksud mewariskan keterangan-keterangan kepada generasi yang akan datang, termasuk yang hidup pada masa kini, karena itu *citralekha* tidak memandang perlu untuk memberikan keterangan yang jelas, karena bagi masyarakat yang hidup sezaman dengannya, maksud dan tujuan yang ada di dalam prasasti tersebut sudah jelas.

## I. 2 Permasalahan Penelitian

Peninjauan kembali hampir selalu menghasilkan penilaian baru (Umar, 1970: 1). Studi tentang prasasti Muṇḍu<sup>o</sup>an sebenarnya merupakan peninjauan

---

<sup>12</sup> Dalam buku *Sejarah Nasional Indonesia* II hlm. 116, disebutkan bahwa "...tanah di Muṇḍu<sup>o</sup>an dan Haji Huma dibebaskan dari pajak jual beli...". Dalam hal ini, suatu daerah yang dijadikan *sīma* biasanya akan mendapatkan pengurangan pembayaran pajak yang biasanya dibayarkan kepada penguasa wilayah. Penyebabnya karena adanya bangunan suci di wilayah yang dijadikan *sīma* sehingga pajak yang seharusnya dibayarkan kepada penguasa wilayah dialokasikan untuk perawatan bangunan suci itu. Jadi, wilayah *sīma* bukannya bebas dari pajak melainkan tetap membayar pajak dan tidak bebas sama sekali dari denda pelanggaran hukum karena semua biaya yang telah terkumpul dari pajak serta denda-denda itu harus dipakai sebagai biaya perawatan bangunan suci.

ulang. Diakui oleh Umar sendiri bahwa pembacaan angka tahun prasasti Munḍu<sup>o</sup>an masih perlu diteliti kembali. Angka ratusan dan satuan dalam prasasti ini dipahatkan dengan jelas, namun pahatan angka puluhannya sudah tidak jelas sehingga menyulitkan pembacaan.

Prasasti Munḍu<sup>o</sup>an saat itu masih dalam tahap penelitian awal sehingga kemungkinan ada kesalahan atau kekeliruan pembacaan serta kekurangan dalam membahas isinya. Untuk mendapatkan kepastian, perlu dilakukan pembacaan ulang untuk mengetahui kesalahan yang mengakibatkan salah penafsiran. Selain itu, kesalahan penafsiran dapat mengakibatkan ketidaktepatan dalam menguraikan peristiwa sejarah yang terjadi. Adanya perbedaan pembacaan angka tahun oleh Muhammad Umar dengan pembacaan angka tahun di dalam buku *Sejarah Nasional Indonesia II* memerlukan pembuktian lebih lanjut, karena apabila ada yang menyusun suatu teori jika di dasarkan angka tahun yang salah, maka hasilnya juga salah. Oleh karena itu, dipahami mengapa pembacaan angka tahun yang tepat merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan.

Hal ini penting untuk mengetahui dengan jelas mengenai berbagai macam aspek seperti tokoh, tempat, waktu, dan peristiwa yang disebut dalam prasasti Munḍu<sup>o</sup>an, agar dapat disusun menjadi sebuah sejarah yang lengkap. Penelitian prasasti Munḍu<sup>o</sup>an sampai saat ini belum mengungkapkan keempat aspek tadi, karena itu perlu dilakukan penelitian lebih mendalam.

Setelah pembacaan angka tahun menjadi jelas, maka permasalahan selanjutnya yang muncul adalah mengenai kelayakan prasasti Munḍu<sup>o</sup>an sebagai data sejarah. Agar tujuan ini tercapai, dilakukan analisis keseluruhan unsur prasasti baik unsur fisik maupun unsur isi. Berdasarkan hasil analisis ini, diharapkan dapat mengungkap keempat aspek utama yang ada di dalam prasasti Munḍu<sup>o</sup>an sehingga dapat menunjang penempatan prasasti ini dalam susunan sejarah Indonesia kuno.

### **I. 3 Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan dari peninjauan ulang prasasti Munḍu<sup>o</sup>an adalah:



1. untuk menerbitkan kembali prasasti Muṇḍu<sup>o</sup>an sesuai dengan kaidah ilmiah yang seharusnya dan disertai dengan pembuatan alih aksara, alih bahasa serta catatan koreksi (tinjauan paleografis) hasil penelitian oleh Muhammad Umar dan juga kesalahan penulisan yang mungkin dilakukan oleh *citralekha*.
2. melengkapi peristiwa sejarah yang sudah ada sesuai dengan keterangan yang diperoleh dari hasil pembacaan serta penafsiran isi prasasti Muṇḍu<sup>o</sup>an dan menempatkannya dalam rangkaian kisah sejarah Indonesia kuno.

#### **I. 4 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian dipusatkan pada isi prasasti Muṇḍu<sup>o</sup>an. Pembacaan angka tahun yang tepat akan menjadi kunci dari penelitian ini agar dapat ditempatkan pada urutan kronologi yang tepat sehingga penelitian ini bermanfaat. Penafsiran isi prasasti Muṇḍu<sup>o</sup>an akan dilakukan dengan membuat perbandingan dengan prasasti-prasasti yang sezaman pada masa Mataram Kuno yang berpusat di Jawa Tengah. Prasasti yang akan dipergunakan sebagai pembanding terutama prasasti *sīma* yang dikeluarkan oleh penguasa wilayah yang dibatasi hingga tahun 850 M. Prasasti-prasasti itu misalnya prasasti Hariñjing A 804 M, prasasti Garung (Penggung) 819 M, prasasti Kamalagi (Kuburan Candi—Pihak Kamalagi) 821 M, prasasti Kayumwungan 824 M, prasasti Gondosuli II 832 M, prasasti Layuwatang (Kadiluwih) 846 M, prasasti Tulang Air I (Candi Perot) 850 M, dan prasasti Tulang Air II (Candi Perot II) 850 M. Namun sebagai bahan perbandingan tambahan juga akan digunakan prasasti *sīma* yang dikeluarkan oleh penguasa wilayah abad ke-9 M (dibatasi hingga tahun 900 Masehi) yakni dari masa pemerintahan Rakai Kayuwangi dan Rakai Balitung.

#### **I. 5 Metode Penelitian**

Bakker (1972) menyatakan bahwa ada lima tahap yang harus dilalui oleh sumber tertulis agar dapat menjadi data sejarah, yakni:

1. penyelidikan akan kebenarannya

2. penyesuaian isi sumber tertulis bersangkutan dengan isi sumber tertulis lain
3. membuat perbandingan dengan berita luar negeri
4. penafsiran terhadap makna sumber tertulis bersangkutan
5. historiografi

### **I. 5. 1. Tahap Pengumpulan Data**

Metode penelitian yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang biasa digunakan dalam ilmu sejarah meliputi empat tahap yaitu (1) tahap pengumpulan data atau heuristik, (2) tahap pengolahan data atau kritik sumber, (3) tahap intepretasi, dan (4) tahap historiografi (Gottschalk, 1975: 34). Namun bagian akhir, yakni historiografi tidak akan dilakukan karena data yang dikaji tidak mencukupi untuk melakukan penulisan sejarah secara keseluruhan.

Heuristik adalah ilmu bantu sejarah untuk menyelidiki sumber-sumber sejarah yang asli secara langsung dengan kritis. Sumber sejarah yang paling utama berasal dari kesaksian orang yang hidup pada zaman yang bersangkutan; contoh sumber sejarah jenis ini misalnya prasasti. Sumber sejarah juga dapat diperoleh dari catatan orang-orang asing pada zaman dulu, namun tingkat keabsahan sumber ini agak diragukan karena ditulis berdasarkan sudut pandang orang luar yang belum tentu memahami keadaan masyarakat pada saat itu (Bakker, 1972:5).

Tahap pertama (heuristik) dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang relevan dengan prasasti Muṅḍu<sup>o</sup>an yang meliputi sejarah penemuan, asal dan tempat penemuan, cara perolehan, serta bahan atau media yang dipergunakan untuk menulis prasasti (Kartakusuma, 2003: 203). Bahan pustaka yang dipakai pada tahap awal pengumpulan data prasasti Muṅḍu<sup>o</sup>an adalah:

1. makalah mengenai prasasti Muṅḍu<sup>o</sup>an karangan Mohammad Umar. Dalam makalah ini diperoleh keterangan mengenai prasasti Muṅḍu<sup>o</sup>an seperti tempat penemuan, keadaan prasasti ketika ditemukan, alih aksara dan terjemahan / alih bahasa, beberapa keterangan mengenai pemakaian aksara, isi prasasti secara umum, serta 5 buah catatan alih bahasa.

2. *Sejarah Nasional Indonesia II*. Keterangan mengenai Prasasti Muṅḍu<sup>o</sup>an hanya satu paragraf di halaman 115 dan 116 yang berisi mengenai angka tahun (807 M) dan isi dari prasasti Muṅḍu<sup>o</sup>an serta gambar reproduksi dari prasasti Muṅḍu<sup>o</sup>an pada halaman 498<sup>13</sup>.
3. “An Inventory of the Dated Inscriptions in Java” *Memoirs of the Research Department of the Toyo Bunko*, 40. keterangan yang dapat diperoleh adalah mengenai nama prasasti, angka tahun (807 M), tempat ditemukannya prasasti (Temanggung, Jawa Tengah), tempat penyimpanan (Semarang), bahan (tembaga), bahasa yang dipergunakan (Jawa Kuno) serta beberapa sumber yang pernah memuat keterangan mengenai prasasti ini<sup>14</sup>.

Pada tahap heuristik tidak hanya bahan pustaka yang berhubungan dengan prasasti Muṅḍu<sup>o</sup>an saja yang akan dikumpulkan. Pencarian prasasti Muṅḍu<sup>o</sup>an ke lapangan juga dilakukan sehingga dapat dilakukan pendokumentasian, yakni pembuatan foto prasasti Muṅḍu<sup>o</sup>an. Pembuatan foto prasasti Muṅḍu<sup>o</sup>an dilakukan menggunakan dua jenis kamera, yakni kamera *digital* dan kamera biasa. Pembuatan foto dilakukan pada pagi hari agar cahaya matahari tidak berlebihan sehingga hasil pemotretan jelas. Sebelum dilakukan pemotretan, prasasti Muṅḍu<sup>o</sup>an diletakkan di lantai dialasi dengan kertas berwarna coklat muda. Alasannya agar hasil foto prasasti Muṅḍu<sup>o</sup>an terlihat lebih jelas. Dalam pemotretan disertakan juga skala. Pemotretan dilakukan tegak lurus terhadap benda agar tidak terjadi distorsi.

Pendokumentasian lain yang dilakukan adalah pembuatan *rubbing* sebanyak dua buah sesuai dengan jumlah lempeng prasasti Muṅḍu<sup>o</sup>an. Pembuatan *rubbing* dilakukan dengan menggunakan pensil 2B serta kertas kalkir dan juga kertas roti. Alasan penggunaan bahan lain selain kertas kalkir adalah untuk melihat perbedaan kejelasan aksara Jawa Kuno prasasti Muṅḍu<sup>o</sup>an antara hasil *rubbing* menggunakan kertas kalkir dan hasil *rubbing* menggunakan kertas

---

<sup>13</sup> Reproduksi foto pada halaman ini dilakukan oleh Edhie Wurjantoro

<sup>14</sup> Berita Yudha (18-XI-1969)

roti. Selain itu, dilakukan identifikasi terhadap prasasti Muṇḍu<sup>o</sup>an menyangkut keadaan fisik prasasti, ukuran, bentuk dan jumlah baris.

### **I. 5. 2. Tahap Kritik Sumber**

Tahap kritik atau analisis, merupakan metode untuk menilai kelayakan sumber-sumber yang dibutuhkan untuk mengadakan penulisan sejarah. Kritik sumber meliputi 2 aspek:

a. kritik ekstern berhubungan dengan keaslian suatu sumber tertulis untuk mengetahui diantaranya bentuk aksara yang dipakai. Kritik ekstern yang dilakukan untuk mengetahui apakah prasasti ini benar-benar asli atau tiruan dengan cara memeriksa aksara yang digunakan, bentuk fisik, serta bahan yang dipergunakan untuk memahatkan prasasti Muṇḍu<sup>o</sup>an. Pemeriksaan terhadap aksara akan dilakukan dengan membuat perbandingan antara prasasti Muṇḍu<sup>o</sup>an dengan prasasti yang menyebut nama wilayah Patapān dan juga Rakai Patapān Pu Manuku misalnya prasasti Tulang Air (850 M), prasasti Gondosuli II (832 M), prasasti Kayumwungan (824 M), dan sebagainya.

b. kritik intern akan dilakukan dengan cara membuat pemenggalan kata sesuai dengan kaidah dasar yang berlaku. Penempatan tanda diakritik juga menjadi perhatian sebab diakritik maupun pemenggalan kata yang tidak benar dapat mempengaruhi makna dari suatu sumber tertulis.

Dalam tahap ini juga dilakukan penyuntingan dengan metode edisi naskah tunggal yang meliputi dua cara yaitu edisi diplomatik dan edisi standar. Menurut Susanti (1997), penerapan penyuntingan terhadap prasasti menggunakan edisi naskah tunggal, karena prasasti bersifat tunggal dan dibuat dalam jumlah terbatas. Metode penyuntingan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode edisi diplomatik. Metode penyuntingan edisi diplomatik adalah metode penyuntingan prasasti atau naskah dengan teliti tanpa mengadakan perubahan apapun. Dalam metode ini, hasil pembacaan harus teliti dengan transliterasi setepat-tepatnya tanpa menambahkan teori-teori lain dari pihak editor (Susanti, 1997: 178).

### **I. 5. 3. Tahap Intepretasi**

Intepretasi adalah usaha untuk mencari hubungan antara apa yang tertulis dan apa yang tersirat dengan hal-hal yang terjadi di lingkungan masyarakat sezaman yang diduga memiliki konotasi dengan isi prasasti. Tahap intepretasi dilakukan setelah tahap penterjemahan selesai disusun (Suhadi, 2003: 131--134). Tahap intepretasi merupakan tahap yang berhubungan dengan penafsiran isi prasasti Munḍu<sup>o</sup>an yang diharapkan telah meliputi aspek peristiwa (fungsional) yang terjadi, waktu terjadinya suatu peristiwa (kronologi), tempat terjadinya suatu peristiwa (geografis) dan tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya (biografis).

### **I. 5. 4. Tahap Penyampaian Data Sejarah dalam Prasasti Munḍu<sup>o</sup>an**

Setelah tahap intepretasi selesai, maka dilanjutkan dengan tahap penyampaian data sejarah yang ada dalam Prasasti Munḍu<sup>o</sup>an. Historiografi merupakan akumulasi dari data-data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber yang berhubungan dengan Prasasti Munḍu<sup>o</sup>an dalam suatu urutan kausal dalam sejarah kuno Indonesia. Bakker (1972) menyebut bagian ini sebagai sintese sejarah; yakni bagian yang menggabungkan segala data dengan berbagai kesimpulannya dan merekonstruksi gambaran kehidupan masa lampau. Pada tahap ini akan dilakukan perbandingan data utama dengan data pendukung yang sudah ada seperti prasasti dan pendapat peneliti terdahulu yang memiliki hubungan dengan prasasti Munḍu<sup>o</sup>an.

### **I. 6. Ejaan**

Dalam tulisan ini, ejaan yang digunakan adalah ejaan bahasa Indonesia yang telah disempurnakan (EYD). Selain itu digunakan juga ejaan yang berlaku dalam bahasa Jawa Kuno yang dimaksudkan untuk menyeragamkan penulisan kata-kata serta nama-nama yang berasal dari bahasa Jawa Kuno. Ejaan itu adalah:

- : tanda perpanjangan di atas aksara vokal
- ^ : tanda perpanjangan di atas aksara vokal karena hukum *sandhi*
- = : tanda ligatur aksara
- °- : tanda bagi aksara vokal yang berdiri sendiri atau aksara vokal yang terletak di awal kata

e	: e taling
ě	: e pěpět
ñ	: ny (n palatal)
ŋ	: ng anuswara
ŋ	: n (domal)
ń	: ng (n laringal)
ś	: sy (palatal)
ş	: sh (domal)
h	: wisarga
ṭ	: t (domal)

### **I. 7. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan dalam kajian ini terdiri atas beberapa bab. Bab I berisi uraian mengenai latar belakang penelitian, permasalahan penelitian, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan metode yang akan digunakan dalam penelitian. Bab II berisi uraian mengenai data utama dalam penelitian yang dimulai dengan riwayat penemuan prasasti, keadaan prasasti, bentuk huruf, bahasa yang digunakan dalam prasasti, ejaan yang digunakan dalam tulisan ini serta susunan isi prasasti. Bab III berisi tentang alih bahasa dan alih aksara dengan disertai catatannya masing masing. Bab IV berisi analisis terhadap prasasti Munḍu<sup>o</sup>an. Analisis dilakukan untuk menentukan kelayakan prasasti Munḍu<sup>o</sup>an sebagai data sejarah. Hal-hal yang dilakukan meliputi kritik ekstern dan kritik intern yang mempermasalahkan keotentikan dan kredibilitas prasasti. Kemudian interpretasi dilakukan dengan cara membandingkan prasasti Munḍu<sup>o</sup>an dengan prasasti lain sehingga dapat diperoleh keterangan mengenai empat aspek yang membentuk sejarah Indonesia kuno yang terdiri dari tokoh, tempat, waktu dan peristiwa. Bab V berisi kesimpulan tentang bab-bab yang telah diuraikan sebelumnya. Pada bagian akhir disertakan juga lampiran-lampiran dan daftar pustaka yang dipergunakan dalam penelitian.